

**RELASI NEGARA DAN BISNIS
DALAM INDUSTRI MINYAK DAN GAS (MIGAS)
DI INDONESIA PADA ERA TRANSISI ENERGI
(Studi Kasus Tata Kelola Migas Tahun 2019-2024)**

Iwan Erwin Immanuel, Pangi Syarwi, M. IP, dan Harsen Roy Tampomuri, M. Si.

E-mail: elimmanuel2006@gmail.com E-mail: pangisyarwi@gmail.com

ABSTRAK

Industri minyak dan gas bumi (migas) merupakan sektor strategis bagi perekonomian dan ketahanan energi Indonesia, namun transisi menuju energi terbarukan serta target Net Zero Emission 2060 menimbulkan dilema antara mempertahankan kontribusi migas dan tuntutan dekarbonisasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam relasi negara dan korporasi migas ketika kebijakan energi mulai beralih ke energi terbarukan, serta menganalisis bentuk hubungan yang terbentuk di tengah dinamika transisi energi. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian dilakukan di Jakarta pada April–Agustus 2025 melalui wawancara dengan analis kebijakan energi, perwakilan BUMN, perusahaan swasta, dan serikat pekerja, serta ditunjang data sekunder dari dokumen resmi dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi negara dan korporasi migas bersifat interdependen, dengan negara bergantung pada penerimaan migas sementara korporasi membutuhkan legitimasi dan perlindungan negara. Tantangan utama mencakup fluktuasi harga global, ketidakpastian regulasi, persaingan energi terbarukan, dan kuatnya lobi politik korporasi migas, yang membuat kebijakan transisi energi berjalan lambat namun tetap membuka peluang inovasi dan kolaborasi strategis. Analisis dengan teori negara korporatisme menjelaskan bentuk relasi institusional dan partisipatif, sedangkan teori ekonomi politik menyoroti relasi kekuasaan dalam kebijakan energi. Kesimpulannya, transisi energi di Indonesia berlangsung secara gradual, kompromistis, dan masih didominasi aktor besar, sehingga keberhasilan masa depan sangat bergantung pada keberanian negara bertindak independen demi mewujudkan energi berkelanjutan.

Kata Kunci: Migas; Relasi; Transisi Energi

ABSTRACT

The oil and gas industry is a strategic sector for Indonesia's economy and energy security, but the transition to renewable energy and the Net Zero Emission 2060 target pose a dilemma between maintaining the contribution of oil and gas and the demands of decarbonization. This study aims to identify the challenges that arise in the relationship between the state and oil and gas corporations as energy policies begin to shift toward renewable energy, as well as to analyze the nature of the relationships formed amid the dynamics of the energy transition. Using a qualitative case study approach, the research was conducted in Jakarta from April to August

2025 through interviews with energy policy analysts, state-owned enterprise representatives, private companies, and labor unions, supported by secondary data from official documents and relevant literature. The results of the study show that the relationship between the state and oil and gas corporations is interdependent, with the state dependent on oil and gas revenues while corporations need state legitimacy and protection. The main challenges include global price fluctuations, regulatory uncertainty, competition from renewable energy, and the strong political lobbying of oil and gas corporations, which has slowed down energy transition policies but still opens up opportunities for innovation and strategic collaboration. Analysis using corporate state theory explains the institutional and participatory nature of the relationship, while political economy theory highlights the power relations in energy policy. In conclusion, the energy transition in Indonesia is taking place gradually, with compromises, and is still dominated by major actors. Therefore, future success depends heavily on the government's courage to act independently to realize sustainable energy.

Keywords: Oil and Gas; Relations; Energy Transition

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu komoditas strategis yang tidak hanya memainkan peran penting pada masa lalu, tetapi juga masih akan menjadi penyumbang energi terbesar dunia dalam beberapa dekade ke depan. Di tingkat global, isu mengenai industri migas, harga minyak, maupun kebijakan nasionalisasi energi selalu menjadi sorotan utama di berbagai media¹. Sektor ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan energi, tetapi juga erat dengan politik, keamanan, dan pembangunan ekonomi.

Akses terhadap sumber daya migas sejak lama diatur melalui skema kerja sama antara investor dan pemerintah. Pada awal perkembangannya, kontrak migas berbentuk konsesi yang cenderung menguntungkan perusahaan internasional. Seiring waktu, negara produsen menuntut bagian yang lebih besar dari pendapatan migas sekaligus meningkatkan peran dalam pengelolaannya².

Di Indonesia, industri migas telah menjadi tulang punggung ekonomi sejak masa kolonial Belanda. Penemuan pertama minyak komersial tahun 1885 di Telaga Said, Langkat, menandai dimulainya era eksploitasi migas di nusantara. Setelah kemerdekaan, pemerintah mendirikan Perusahaan Migas Nasional (*National Oil Company/NOC*) sebagai wujud kedaulatan energi. Pertamina, sebagai BUMN migas utama, berperan ganda: regulator sekaligus pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya relasi antara negara dan korporasi migas, baik nasional maupun internasional, selalu sarat dengan negosiasi kepentingan politik dan ekonomi³.

¹ Benny Lubiantara. (2012). *Ekonomi Migas*. Gramedia.

² Fransisco Para. (2010). *Oil Politic - A Modern History of Petroleum*.

³ Sritua Arif. (1976). *The Indonesian petroleum Industry: A Study of Resource Management in a Developing Economy*.

Kini, industri migas menghadapi dilema global: di satu sisi masih menyumbang sekitar 84% energi primer dunia, sementara di sisi lain dunia menuntut percepatan dekarbonisasi menuju *Net Zero Emission* (NZE) pada 2060. Indonesia, produsen migas terbesar ke-23 dunia, juga berada dalam kontradiksi kebijakan. Pemerintah menargetkan produksi minyak mencapai 1 juta barel per hari pada 2030, namun di saat yang sama harus memenuhi bauran energi terbarukan 17–19% pada 2025⁴.

Di tingkat domestik, perusahaan seperti Pertamina dan Medco Energi mulai mengembangkan energi terbarukan, tetapi skala investasi tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan sektor hulu migas. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi logika migas belum tergantikan. Terdapat ketegangan struktural antara kepentingan jangka pendek ekonomi migas dan agenda jangka panjang transisi energi. Pertanyaan penting muncul: sejauh mana negara memiliki kapasitas dan kehendak untuk mengarahkan transisi energi, ataukah negara hanya menjadi arena kompromi bagi kepentingan bisnis yang dominan?

Periode pemerintahan Joko Widodo–Ma'ruf Amin (2019–2024) menjadi konteks menarik untuk menelaah persoalan ini. Di satu sisi, pemerintah menerapkan kebijakan *gross split* untuk efisiensi, mendorong BUMN mengambil alih blok-blok strategis, serta menyusun peta jalan transisi energi. Namun di sisi lain, produksi migas stagnan, *lifting* terus menurun (576 ribu barel/hari pada 2024, di bawah target 635 ribu barel/hari), dan impor migas semakin tinggi (60% kebutuhan minyak dipenuhi impor). Kondisi ini diperparah oleh menurunnya minat investor asing akibat regulasi yang dianggap kurang stabil⁵.

Dalam situasi demikian, penting untuk menelaah bagaimana relasi antara negara dan bisnis migas terbentuk. Negara berperan sebagai regulator dan pemilik sumber daya, sedangkan korporasi—baik BUMN maupun swasta nasional dan internasional—mengendalikan operasi teknis dan investasi. Hubungan keduanya tidak lepas dari dinamika tawar-menawar, konflik, hingga kompromi. Studi mengenai relasi negara–bisnis dalam migas menjadi krusial untuk memahami arah kebijakan energi Indonesia: apakah tetap bertumpu pada migas, atau benar-benar bergerak menuju energi bersih.

Rumusan Masalah Penelitian

1. Apa saja tantangan yang muncul dalam relasi negara dan korporasi migas saat kebijakan energi beralih ke energi terbarukan?
2. Bagaimana relasi antara negara dan pelaku bisnis migas di tengah transisi energi terbarukan?

⁴ Geny Jati. (2024). IETO 2025: Status dan Perkembangan Transisi Energi Indonesia. <https://iesr.or.id/ieto-2025status-dan-perkembangan-transisienergi-indonesia/>

⁵ Aditya Putra Perdana. (2024). "Lifting" Minyak hingga Elpiji, Target Kepala SKK Migas Baru. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/lifting-migashingga-elpiji-tugas-kepala-skk-migas-baru>

Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam relasi negara dan korporasi migas saat kebijakan energi mulai beralih ke energi terbarukan.
2. Untuk menganalisis bentuk relasi antara negara dan pelaku bisnis migas di tengah transisi menuju energi terbarukan.

Manfaat Penelitian Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu sosial dan politik, khususnya dalam memahami dinamika relasi antara negara dan sektor swasta dalam industri strategis seperti migas di tengah perubahan global menuju energi terbarukan.
2. Memperkaya literatur tentang ekonomi politik energi, dengan menyoroti bagaimana aktor-aktor negara dan bisnis berinteraksi, bernegosiasi, atau bahkan berkonflik dalam proses transisi energi di negara berkembang seperti Indonesia.

Manfaat Praktis

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam merumuskan strategi transisi energi yang tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan ekonomi dan relasi kuasa antara negara dan korporasi.
2. Menyediakan perspektif kritis bagi masyarakat sipil dan akademisi, dalam menilai peran negara serta korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk potensi keberpihakan, kepentingan tersembunyi, maupun dampaknya terhadap agenda transisi energi nasional.

TINJAUAN PUSTAKA.

Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Edy Soesanto, Arya Raihan, Setya Angga (2025) dengan judul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Keberlanjutan Industri Migas di Era Transisi Energi”. Hasil penelitiannya yaitu sektor migas tetap menjadi penyumbang utama pendapatan negara, namun sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak global yang memengaruhi stabilitas fiskal. Dalam jangka panjang, sektor ini menghadapi tekanan transisi energi bersih sehingga Indonesia perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan dengan target bauran 23% pada 2025. Untuk mendukung ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan

pada fosil, kebijakan negara harus difokuskan pada diversifikasi energi, efisiensi migas, dan penerapan teknologi ramah lingkungan seperti CCS/CCUS⁶.

Penelitian kedua oleh Agung Yudha Wibowo (2023) dengan judul “Strategi pengembangan energi baru terbarukan dalam rangka ketahanan energi”. Hasil penelitiannya yaitu Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) masih jauh dari target, di mana capaian bauran nasional pada semester I 2023 baru mencapai 12,72% dari target 23% pada 2025. Hambatan utama meliputi keterbatasan pendanaan, ketidakpastian regulasi, perizinan yang rumit, kendala teknis, serta tingginya biaya produksi EBT dibanding energi konvensional⁷.

Penelitian ketiga oleh Siti Fadillah dan Edy Soesanto (2023) dengan judul “Analisis Dampak Kegiatan Industri Hulu Migas Terhadap Pembangunan Nasional dalam Aspek Ekonomi Regional Indonesia”. Hasil penelitiannya yaitu Terlihat dari segi ekspor dan impor migas nonmigas, nilai ekspor pada awal 2023 lebih tinggi dari impor, sehingga Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar US\$3,87 miliar. Nilai ekspor yang cukup tinggi didominasi oleh nonmigas. Namun, ekspor migas lebih berpengaruh secara signifikan karena memiliki trend pertumbuhan ekonomi yang stabil⁸.

Penelitian keempat oleh Prima Gandhi (2014) dengan judul “Analisis Kualitatif Nilai Ekspor Migas Indonesia Dan Kepemilikan Blok Migas Oleh Perusahaan Asing Di Indonesia”. Hasil penelitiannya yaitu Dominasi perusahaan migas asing atas blok-blok nasional mengurangi porsi eksplorasi Pertamina, sehingga ekspor migas Indonesia terus menurun. Untuk meningkatkan nilai ekspor, pemerintah perlu memperkuat teknologi sekaligus berani merenegosiasi hak eksploitasi perusahaan asing⁹.

Penelitian kelima oleh Dzikri Walisyah Jamal, Edy Soesanto, Rizky Andreanusa, dan Bismaka Daniswara (2025) dengan judul “Dampak Kegiatan Usaha Hulu Migas Terhadap Perekonomian Regional Wilayah Kerja Migas”. Hasil penelitiannya yaitu Demi memaksimalkan manfaat ekonomi dari sektor migas, perlu dilakukan pengelolaan yang bijaksana dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Rekomendasi untuk pemerintah dan perusahaan migas di indramayu adalah untuk meningkatkan program-program CSR yang lebih menyentuh langsung kepada masyarakat, serta mengembangkan sektor ekonomi lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada migas¹⁰.

⁶ Soesanto, E., Raihan, A., & Angga, S. (2025). Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Keberlanjutan Industri Migas di Era Transisi Energi

⁷ Wibowo, A. Y. (2023). Strategi pengembangan energi baru terbarukan dalam rangka ketahanan energi. 1–87

⁸ Fadillah, S., Bhayangkara, U., Raya, J., & Soesanto, E. (2023). Analisis Dampak Kegiatan Industri Hulu Migas Terhadap Pembangunan Nasional Dalam Aspek Ekonomi Regional Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 1(4), 10–24

⁹ Gandhi, P. (2014). Analisis Kualitatif Nilai Ekspor Migas Indonesia Dan 93 Kepemilikan Blok Migas Oleh Perusahaan Asing Di Indonesia. *Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics*, 1(1), 87–101.

¹⁰ Jamal, D. W., Soesanto, E., Andreanusa, R., Daniswara, B., Studi, P., Perminyakan, T., Teknik, F., & Jakarta, U. B.

Landasan Teori Teori Utama Teori Negara Korporatisme

Korporatisme, menurut Schmitter, terbagi menjadi dua bentuk: korporatisme negara, di mana negara mengendalikan organisasi masyarakat, dan korporatisme masyarakat, di mana fungsi negara dijalankan aktor non-negara. Dalam industri migas Indonesia, keduanya hadir sekaligus: negara mengatur lewat regulasi dan BUMN, sementara swasta—nasional maupun asing—berperan besar dalam eksplorasi dan investasi. Di tengah transisi energi, dinamika ini semakin kompleks karena negara harus mendorong energi terbarukan tanpa mengabaikan migas sebagai penopang penerimaan negara, menjadikan teori korporatisme relevan untuk menganalisis relasi negara-bisnis migas.

Teori Pendukung Teori Ekonomi Politik

Ekonomi politik dapat diartikan sebagai studi tentang teori sosial dan masalah keterbelakangan. Namun, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa ekonomi politik tidak hanya terbatas pada kajian teori sosial dan keterbelakangan. Menurut Caporaso & Levine dalam¹¹, ekonomi politik juga berfungsi untuk memberikan rekomendasi dalam pengelolaan masalah ekonomi kepada para pengelola negara. Dalam konteks politik sebagai bentuk otoritas, hubungan antara ekonomi dan politik dapat dipahami sebagai masalah keterkaitan antara kekayaan dan kekuasaan. Penciptaan dan distribusi kekayaan erat hubungannya dengan aspek ekonomi, sementara penciptaan dan distribusi kekuasaan berkaitan dengan aspek politik. Perbedaan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik yang memfokuskan pada kekayaan dan kekuasaan lebih bersifat untuk tujuan analitis saja. Pada kenyataannya, kekayaan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif deskriptif-analitis untuk memahami dinamika relasi negara dan bisnis di industri minyak dan gas Indonesia, khususnya dalam kebijakan energi dan transisi energi terbarukan. Jenis penelitian adalah studi kasus pada periode 2019-2024, dengan analisis kritis terhadap struktur dan praktik relasi antara negara dan pelaku usaha migas. Penelitian dilakukan dari April hingga Agustus 2025 di Jakarta. Sumber data meliputi dokumen resmi, laporan pemerintah, data perusahaan migas, kajian akademik, media massa, serta wawancara mendalam dengan informan dari Kementerian ESDM, Pertamina, Medco Energi, dan organisasi serikat pekerja FSP KEP-KSPSI serta terdiri dari pernyataan publik pejabat negara dan eksekutif migas, dan dokumen kebijakan, laporan tahunan perusahaan, artikel ilmiah, dan berita nasional maupun internasional. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, studi literatur, dan penelaahan dokumen resmi. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber dan analisis

(2025). Analisa Dampak Kegiatan Usaha Hulu Migas terhadap Ekonomi Migas di Indramayu ¹¹

Deliarinov. (2006). Ekonomi Politik. Penerbit Erlangga

kredibilitas dari lembaga resmi, media tepercaya, dan publikasi akademik, serta konfirmasi antar data. Analisis data menggunakan *content analysis* dan *thematic analysis* dengan langkah reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi menggunakan teori negara dan ekonomi politik energi, serta penyimpulan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Yang Muncul Dalam Relasi Negara dan Korporasi Migas Saat Kebijakan Energi Beralih ke Energi Terbarukan

Sektor minyak dan gas bumi (migas) memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penyumbang pendapatan negara maupun sebagai penopang ketahanan energi nasional. Selama bertahun-tahun, kontribusi migas menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terbesar bagi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), sekaligus berperan penting dalam struktur APBN. Namun, posisi dominan ini juga menimbulkan kerentanan, sebab ketergantungan pada harga minyak global membuat stabilitas fiskal Indonesia sangat terpengaruh oleh dinamika pasar energi internasional. Dalam konteks global, tekanan terhadap energi fosil semakin meningkat seiring dengan agenda transisi energi menuju sumber energi rendah karbon, sehingga posisi migas Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Industri migas Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius. Pertama, biaya eksplorasi yang tinggi serta risiko investasi yang besar membuat investor berhati-hati, apalagi ditambah dengan proses regulasi dan perizinan yang rumit. Kedua, persaingan dengan energi terbarukan semakin nyata, karena kebijakan global mendorong pengurangan emisi karbon dan peralihan ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Ketiga, Indonesia menghadapi persaingan ketat dari negara lain seperti Malaysia, Vietnam, dan negara-negara Timur Tengah yang memiliki cadangan lebih besar serta biaya produksi lebih rendah.

Selain itu, penurunan produksi juga menjadi masalah krusial. Banyak lapangan migas Indonesia sudah tua sehingga membutuhkan teknologi canggih seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) agar tetap produktif. Namun, keterbatasan investasi dan teknologi memperlambat upaya peningkatan produksi. Kondisi ini membuat target lifting migas sulit tercapai dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat yang sama, ketergantungan negara terhadap penerimaan migas justru tetap tinggi. Hal ini menimbulkan dilema: di satu sisi pemerintah ingin mendorong transisi energi, tetapi di sisi lain masih sangat membutuhkan migas sebagai sumber pendapatan. Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah menempuh berbagai langkah strategis. Pertama, upaya penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif fiskal dilakukan untuk menarik minat investasi baru di sektor migas. Kedua, pemerintah mendorong program reaktivasi lapangan tua dengan penerapan teknologi canggih, termasuk digitalisasi, pemanfaatan *Internet of Things* (IoT), *big data*, dan teknologi EOR. Ketiga, kerja sama internasional diperkuat melalui skema *Government-to-Government* (G-to-G) maupun *Business-to-Business* (B-to-B), dengan tujuan meningkatkan investasi serta memperkuat diplomasi energi Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga berusaha menyeimbangkan peran migas dengan agenda transisi energi. Salah satunya melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dengan target bauran energi 23% pada tahun 2025. Walaupun capaian hingga 2023 masih sekitar 12,7%, pemerintah berkomitmen mempercepat pengembangan EBT dengan mendorong investasi,

memperbaiki regulasi, serta mengatasi hambatan seperti biaya produksi yang masih tinggi dibanding energi konvensional.

Dalam perspektif teori korporatisme Philippe Schmitter, relasi antara negara dan korporasi migas di Indonesia memperlihatkan dinamika yang khas. Negara tetap memegang kendali kuat melalui regulasi, BUMN seperti Pertamina, serta kebijakan energi nasional. Namun, peran korporasi swasta, baik nasional maupun asing, semakin besar dalam eksplorasi, produksi, dan investasi infrastruktur energi. Hal ini menunjukkan perpaduan antara korporatisme negara dan korporatisme masyarakat.

Di era transisi energi, tarik-ulur kepentingan semakin jelas. Negara dihadapkan pada dilema: menjaga penerimaan fiskal dari migas sekaligus berkomitmen pada target energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Dari sisi korporasi, perusahaan migas menekankan bahwa investasi jangka panjang di sektor ini tidak bisa serta-merta dialihkan ke energi terbarukan tanpa kepastian keuntungan. Sementara itu, pekerja migas berada dalam posisi rentan karena keberlangsungan pekerjaan mereka sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan energi nasional. Relasi ini sering kali mencerminkan kompromi antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan agenda keberlanjutan jangka panjang.

Industri migas Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, sektor ini tetap menjadi penopang utama perekonomian dan sumber penerimaan negara, namun di sisi lain tekanan global terhadap energi fosil dan agenda transisi energi menuntut perubahan arah kebijakan. Relasi negara dan korporasi migas mencerminkan dinamika korporatisme, di mana negara dan swasta berbagi peran, meski kepentingan keduanya sering bertentangan. Ke depan, pemerintah perlu menempuh kebijakan yang lebih adaptif, konsisten, dan seimbang: mempertahankan peran migas sebagai tulang punggung ekonomi sembari mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Hanya dengan cara ini Indonesia dapat menjaga ketahanan energi sekaligus memenuhi komitmen global menuju ekonomi rendah karbon.

Relasi Antara Negara dan Pelaku Bisnis Migas di Tengah Transisi Energi Terbarukan

Industri migas Indonesia berada pada posisi strategis sekaligus dilematis dalam menghadapi transisi energi global. Di satu sisi, sektor ini masih menjadi penyumbang utama pendapatan negara dan penyedia energi nasional. Di sisi lain, tuntutan internasional untuk menekan emisi karbon serta target nasional menuju bauran energi terbarukan menuntut perubahan besar dalam pola produksi dan konsumsi energi.

Negara berperan sebagai pengatur utama melalui kebijakan energi, regulasi, serta target jangka panjang seperti *Net Zero Emission* 2060. Peran ini diwujudkan dalam penyusunan peta jalan energi, pemberian insentif fiskal, dan pengembangan teknologi rendah karbon seperti *Carbon Capture and Storage*. Namun, kebijakan negara tidak dapat berdiri sendiri, sebab implementasi di lapangan sangat bergantung pada kapasitas, kepentingan, dan komitmen pelaku bisnis migas. Perusahaan migas, baik BUMN maupun swasta, menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mendorong diversifikasi ke energi baru dan terbarukan. Mereka tidak hanya menjalankan arahan regulasi, tetapi juga turut terlibat dalam proses perumusan strategi transisi energi. Hal ini terlihat dari meningkatnya investasi perusahaan pada

energi surya, bioenergi, hidrogen, serta proyek-proyek berbasis gas bumi yang dianggap sebagai energi transisi.

Relasi negara dan korporasi dalam sektor migas sering kali menunjukkan pola korporatisme. Negara tetap memegang kendali melalui regulasi, kepemilikan BUMN, dan kebijakan energi, namun memberikan ruang luas bagi perusahaan swasta, termasuk asing, untuk berperan dalam eksplorasi, produksi, dan investasi. Dengan pola ini, hubungan antara negara dan korporasi bersifat negosiasional: negara membutuhkan korporasi untuk menjaga pasokan energi dan mendorong investasi, sementara korporasi membutuhkan negara untuk mendapatkan kepastian regulasi, akses sumber daya, dan perlindungan politik.

Namun, pola korporatisme ini juga menimbulkan eksklusivitas. Aktor besar seperti perusahaan multinasional atau BUMN memperoleh akses utama dalam perumusan kebijakan, sementara kelompok lain seperti pekerja dan masyarakat lokal sering kali tidak dilibatkan secara penuh. Akibatnya, transisi energi cenderung dikuasai oleh kompromi elit negara–korporasi dibandingkan aspirasi yang lebih inklusif.

Perusahaan migas merespons transisi energi dengan menjalankan strategi diversifikasi. Investasi tidak hanya diarahkan pada energi fosil, tetapi juga ke energi baru dan terbarukan. Upaya ini sejalan dengan strategi negara untuk menurunkan ketergantungan pada migas sekaligus menjaga daya saing ekonomi. Namun, hambatan besar masih ada, seperti kebutuhan biaya tinggi, keterbatasan teknologi, dan infrastruktur yang belum siap. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara negara, korporasi, lembaga riset, dan komunitas lokal menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan transisi.

Relasi negara dan pelaku bisnis migas dalam konteks transisi energi dapat dipahami sebagai hubungan yang saling membutuhkan namun penuh dilema. Negara tetap berperan sebagai pengarah kebijakan, sementara korporasi menjadi mitra strategis sekaligus agen pelaksana di lapangan. Pola korporatisme membuat relasi ini bersifat eksklusif, lebih menekankan stabilitas ekonomi dan politik ketimbang partisipasi luas dari masyarakat.

Dengan demikian, transisi energi di Indonesia berlangsung secara gradual dan kompromistis. Negara menjaga keseimbangan antara kepentingan jangka pendek migas dengan agenda jangka panjang energi bersih, sementara korporasi beradaptasi melalui diversifikasi energi. Agar transisi berjalan adil, perlu ada keterlibatan lebih luas dari pekerja dan masyarakat sipil sehingga tidak hanya menguntungkan aktor besar, tetapi juga memberikan manfaat merata bagi seluruh pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam transisi energi di Indonesia, hubungan antara negara dan korporasi migas bersifat negosiasional dan strategis. Negara, meskipun memiliki kewenangan formal untuk mengatur arah kebijakan energi, tidak sepenuhnya otonom karena harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan politik dari pelaku industri migas. Di sinilah teori negara korporatisme dan ekonomi politik saling melengkapi: teori negara korporatisme menjelaskan bentuk relasi institusional dan partisipatif

antara negara dan bisnis, sedangkan teori ekonomi politik menjelaskan relasi kekuasaan yang mendasari terbentuknya kebijakan-kebijakan energi di Indonesia. Akhirnya, relasi antara negara dan bisnis migas dalam masa transisi energi bukanlah hubungan yang netral, melainkan hasil dari kompromi, negosiasi, dan aliansi strategis antara kepentingan politik negara dan kepentingan ekonomi korporasi. Relasi ini menciptakan struktur tata kelola energi yang tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik atau lingkungan, tetapi lebih pada stabilitas kekuasaan dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, masa depan transisi energi di Indonesia akan sangat bergantung pada seberapa kuat negara mampu memainkan perannya sebagai aktor independen yang tidak semata-mata tunduk pada logika pasar, tetapi juga berani mengambil langkah tegas untuk mewujudkan energi yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Benny Lubiantara. (2012). *Ekonomi Migas*. Gramedia.

Francisco Para. (2010). *Oil Politic – A Modern History of Petroleum*.

Sritua Arif. (1976). *The Indonesian petroleum Industry: A Study of Resource Management in a Developing Economy*.

Geny Jati. (2024). *IETO 2025: Status dan Perkembangan Transisi Energi Indonesia*.

<https://iesr.or.id/ieto-2025status-dan-perkembangan-transisienergi-indonesia/>

Aditya Putra Perdana. (2024). "Lifting" Minyak hingga Elpiji, Target Kepala SKK Migas Baru. *Kompas*.

<https://www.kompas.id/artikel/lifting-migashingga-elpiji-tugas-kepalaskkmigas-baru>

Soesanto, E., Raihan, A., & Angga, S. (2025). Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Keberlanjutan Industri Migas di Era Transisi Energi

Wibowo, A. Y. (2023). Strategi pengembangan energi baru terbarukan dalam rangka ketahanan energi. 1–87

Fadillah, S., Bhayangkara, U., Raya, J., & Soesanto, E. (2023). Analisis Dampak Kegiatan Industri Hulu Migas

Terhadap Pembangunan Nasional Dalam Aspek Ekonomi Regional Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 1(4), 10–24

Gandhi, P. (2014). Analisis Kualitatif Nilai Ekspor Migas Indonesia Dan 93 Kepemilikan Blok Migas Oleh

Perusahaan Asing Di Indonesia. *Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics*, 1(1), 87–101.

Jamal, D. W., Soesanto, E., Andreanusa, R., Daniswara, B., Studi, P., Perminyakan, T., Teknik, F., & Jakarta, U. B.

(2025). Analisa Dampak Kegiatan Usaha Hulu Migas terhadap Ekonomi Migas di Indramayu
11 Deliarnov. (2006). Ekonomi Politik. Penerbit Erlangga